

POLITIK UMAT ISLAM INDONESIA: Upaya Depolitisasi Pascakemerdekaan

Mutawakkil

Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta 9, Palu
e-mail: sekруб_sawitto@yahoo.com

Abstract

This paper deals with political relations between the state and Moslem communities in Indonesia at the first emergence until being political power from the seventh century to the beginning of the nineteenth century. This issue will be discussed using socio-historical analysis. Based on the data analysis, the Muslim community played a significant role in a parliamentary democracy. Thus, they were marginalized in a guided democracy, and become an object, rather than a subject, both in the New Order and the Reform era, in terms of a variety of national issues. In other words, Muslim community become a target of depolitization and such issues as the sole principle, moral education of *Pancasila*, veiling, right-wing extremists, and terrorism, despite of the fact that the 1945 Constitution gives to all Indonesian people a freedom to embrace their religion.

يتناول هذا البحث علاقة سياسية بين الشعب الإندونيسي في جانب والأمة المسلمة الإندونيسية في جانب اخر وذلك اثر ظهورها والتي تحولت الى قوة سياسية في القرن السابع حتى بداية القرن الثلث عشر. ثم بحث هذه القضية من خلال الإجتماعية الحضارى التاريخى. فبناء عن تحليل المعلومات القائمة يتضح أن الأمة الإسلامية الإندونيسية كانوا يلعبون دورا هاما في عهد الديموقراطية البرلمانية ثم تجنبوا خلال عهد الديموقراطية المزعومة وفي عهدى الحكومة الجديد والإصلاح يبدو أن المسلمين كانوا هدفا لا ذاتيا مؤثرا في مجالات الشعب أو بعبارة اخرى أن المسلمين كانوا محل الإستغلال السياسى من غيرهم من العلمانيين فى الدولة و كثير من الشائعات فى هذا البلد مثل المبدأ الموحد وتربية بنشاشيلا و ارتداء الجلباب و التطرف والإرهاب دائما يخسرون فيها المسلون مع أن دستور الدولة وهو الدستور ١٩٤٥ يمنح حرية مطلقة لكافة الشعب الإندونيسى فى اعتناق أى دين يتقون به.

Kata Kunci: politik Islam, depolitisai, umat Islam Indonesia

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam (sekitar 89,09%). Menurut statistik, jumlah ini termasuk mereka yang ber-KTP Islam dan mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang kekuatan politik umat Islam Indonesia, maka angka nominal yang besar ini sedikit banyak dapat salah letak (*misleading*). Terbukti pada hasil pemilu baik untuk parlemen maupun konstituante 1955, empat partai Islam (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) hanya berhasil mengumpulkan suara sekitar 42,5%. Demikian pula pemilu-pemilu berikutnya, 1971, 1982 dan seterusnya menunjukkan bahwa partai Islam hanya mampu mencapai sekitar sepertiga dari jumlah suara, bahkan pada pemilu dari orde ke orde, sampai pada era Reformasi, suara umat Islam tidak dapat menjadi mayoritas.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa peran politik umat Islam dari masa ke masa semakin kecil karena kurangnya peran politik santri di Indonesia. Sinyalemen ini banyak terdengar di kalangan kelompok santri yang merasa bahwa mereka tidak terwakili secara dalam lembaga-lembaga negara, baik di lembaga Legeslatif, Eksekutif maupun Yudikatif.

Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, wakil-wakil umat Islam (santri) pernah menjadi elite penguasa (*ruling elite*), akan tetapi selalu duduk di atas kursi panas (*hot seat*) dalam setiap pemerintahannya. Misalnya, Muhammad Natsir, dr Soekiman Wirjosandjojo dan Burhanuddin Harahap yang masing-masing pernah menjadi perdana menteri di zaman Kabinet Parlemonter. Begitu pula era Reformasi, ketika jabatan presiden dipegang oleh B.J. Habibie dan Abd. Rahman Wahid.

Kesenjangan antara kenyataan sejarah beberapa puluh tahun yang lalu dengan kenyataan sekarang ini, barangkali bagi sementara orang Islam merupakan suatu masalah yang belum dapat dipahami sepenuhnya. Sudah tentu kesenjangan itu timbul sebagai akibat proses politik yang berjalan di Indonesia. Tetapi mengapa terjadi demikian, apakah benar umat Islam Indonesia hanya seperti buih di lautan yang diombang-ambingkan oleh ombak? Ataukah banyak orang munafik yang disusupkan ke dalam kelompok Islam oleh lawan-lawannya? Ataukah umat Islam Indonesia hanya menjadi ajang permainan politik untuk menggait kepentingan pribadi? Umat Islam Indonesia harus

menyadari masalah ini dan banyak belajar dari peristiwa sejarahnya supaya umat Islam dapat memahami hubungan politik bangsa Indonesia dan umat Islam pada awal kemunculannya, yang kemudian menjadip *political power* abad ke-7 sampai awal abad ke-19 M.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KONSEPSI NEGARA BANGSA

Salah satu konsep Negara Bangsa yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw., tergambar dalam satu hadisnya, bahwa ketika Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang, seorang munafik dari Bani Tamin berkata, "Berbuat adillah, wahai Muhammad !" perkataan itu membuat nabi saw. marah maka Umar berkata, "Apakah aku membunuh orang ini?" Rasulullah bersabda, "Aku berlindung kepada Allah swt., jika umat lain mendengar bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya" (HR. Ahmad). Contoh ini menandakan bahwa pluralitas suatu bangsa itu tidak berimplikasi pada penghancuran pihak lain melainkan bertujuan meluruskan sikap dan menjadi penguat yang membawa manfaat, karena berada dalam kerangka kesatuan nilai konstan yang dapat memuaskan seluruh pihak dalam suatu bangsa yang majemuk.

Bagi umat Islam, konsep Negara Bangsa bukanlah persoalan karena konsep ini mengakomodir perbedaan latar belakang ras, suku, bangsa, bahasa, agama, dan derajat sosial. Yang dimaksud umat Islam di sini ialah suatu himpunan orang yang menyatakan diri pemeluk agama Islam, menjalankan ritus keagamaannya, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang ajaran Islam dan berusaha mengatur prilakunya di tengah masyarakat sesuai dengan ajarannya, serta orang Islam yang terlibat secara ideologis dengan ajaran Islam (Rais, 1989:42-43).

Itulah sebabnya, umat Islam sangat menerima konsep Negara Bangsa Republik Indonesia yang diproklamisikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebab sesuai dengan konsep nasionalisme modern sejati ala Madinah yang dibangun Nabi Muhammad saw., yaitu suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga tanpa kecuali dengan menyatukan suku bangsa yang berbeda-beda, yang merupakan unsur esensial bagi pembangunan bangsa (Madjid, 2004:70), yang dalam istilah Islam pluralitas dalam konsep kesatuan (Imarah, 1997:20).

Indonesia, jauh sebelum diperkenalkan, merupakan tempat tinggal terbesar umat Islam di dunia dengan nama Kepulauan Nusantara. Negara ini adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang tidak menganut paham sekuler dan bukan negara agama (Effendi, 1984:347). Oleh karena itu, negara tidak mencampuri urusan syariaah dan ibadah-ibadah agama tertentu, tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (2), maka pemerintah Indonesia berkewajiban melayani hajat dan kepentingan bangsa dalam kehidupan beragama sebab pembangunan kehidupan agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Di wilayah Indonesia telah berlangsung demikian banyak peralihan bangsa-bangsa dan berbagai bentuk kekuasaan, mulai dari kekuasaan kerajaan, kekuasaan dagang di bawah kolonial Belanda ke negara modern yang muncul pada awal abad ke-19 dan kemudian negara kebangsaan sekuler pada pertengahan abad ke-20 sehingga mayoritas umat Islam hanya menjadi *power shift* dalam perjalanan sejarahnya, yaitu kekuasaan abadi tetapi penguasanya berganti-ganti.

Indonesia merupakan bekas jajahan Eropa (Belanda) di Nusantara sehingga perangkat-perangkat ideologis dan struktur sosial telah terbaratkan setelah kemerdekaan. Lapisan-lapisan sosial peninggalan kolonial menampakkan sebuah perubahan sosial yang besar dalam kehidupan umat Islam. Di Jawa misalnya, segmen-segmen komunitas yang sudah termodernisasikan atau terbaratkan muncul menjadi elite-elite yang berkuasa sehingga mereka harus merebut kedudukan-kedudukan di birokrasi, perekonomian dan kebudayaan.

Perkembangan ideologi politik umat Islam sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi, tidak pernah mengemuka dalam kemenangan karena umat Islam masing-masing berjuang untuk kepentingan golongannya bukan untuk kepentingan Islam. Artinya, walaupun secara kuantitatif masyarakat Indonesia adalah umat Islam, anspirasi politiknya belum tentu ke satu muara partai Islam. Agama boleh Islam, namun ideologi belum tentu, sebab perkembangan partai politik Islam berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *the ideology of tolerance* yang selalu memagari hampir setiap diskursus politik umat (Kusnadinigrat, 1996:108).

Partai Islam senantiasa dituduh terlalu mengeksploitasi fanatisme keagamaannya pada publik. Penguasa melihat mereka sebagai *oposan* yang menyebabkan instabilitas dan pergolakan dalam demokrasi, dan menjadi kekuatan yang potensial mengandung unsur disintegrasi, serta suatu jalan artifisial dalam memecah belah masyarakat. Padahal peran umat Islam tidak diragukan lagi dalam menyumbangkan darah dan tulang belulang terhadap proses integrasi nasional, Itulah lakon di atas panggung sejarah Indonesia. Umat Islam merintis jalan dan berkorban namun golongan lain yang meneruskan dan memberi penyelesaian-penyelesaian (Madjid, 1999:45).

Ironisnya, umat Islam justru ditekan oleh segmen komunitas yang terbaratkan oleh sistem pendidikan kolonial pascakemerdekaan. Begitu pula kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi Orde Lama sering menyebabkan terjadinya marjinalisasi peranan komunitas Muslim dalam masalah-masalah nasional. Pada permulaan bangkitnya Orde Baru, umat Islam sering mendapat ejekan sebagai kelompok mayoritas tetapi minoritas tekhnis. Sama halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dengan sengaja memunculkan komunitas pedagang Cina untuk menghambat komunitas kapitalis Muslim.

Perdebatan umat Islam terjadi pertama kali berkisar pada ide tentang demokrasi ekonomi, di mana mereka menuntut emansipasi agar tidak ada pemihakan Pemerintah Kolonial (berat sebelah) terhadap pedagang Tionghoa (Cina). Ide ini menjadi suatu gerakan kaum pribumi, dipimpin oleh Haji Samanhudi yang mendirikan Sjarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 (Suryanegara, 1995: 235). Kemudian bermetamorphosis menjadi gerakan politik pedagang batik Solo dengan nama Syarikat Islam (SI) setelah melewati pergulatan panjang dan terputus-putus.

Spirit kelembagaan ini muncul kembali dalam negara Indonesia setelah kemerdekaan dengan gerakan separatis Darul Islam (DI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Upaya-upaya itu adalah perebutan hak untuk mengatur pembangunan yang adil agar umat Islam tidak dianaktirikan dalam struktur ekonomi dan pemerintahan. Konsekuensinya, pembangunan ekonomi yang didasarkan pada sistem kapitalisme klasik akan terlibat dalam hiruk pikuk institusi yang merugikan umat Islam.

Dengan munculnya konsep Negara Bangsa ala Eropa abad ini, umat Islam Indonesia mendapat tantangan dan masalah dalam mengaktualisasikan cita-cita keagamaan mereka dalam konteks sosial karena alasan historis yang jelas. Mereka selalu ditekan sehingga tidak dapat muncul sebagai komunitas muslim yang kuat secara politik, yang menurut Muhammad Munir dalam Munawwir (1984:201), hal ini terjadi karena hilangnya kekuatan politik Islam secara perlahan, ekonomi mereka berada di batas terendah, kekakuan dari sistem ortodoks dan menghilangkan nilai-nilai dasar Islam dalam kehidupan keseharian. Selain itu, menurut Suryanegara (2003:41) diperburuk lagi oleh pembelokan fakta sejarah umat Islam Indonesia.

Pembelokan itu dilakukan oleh sejarawan Indonesia yang telah menjadi salah satu alat dari kekuasaan, yang harus menulis sejarah yang mendukung dan mensahkan mitos yang dicetuskan penguasa melalui penelitian, seperti mitos Majapahit Raya sebagai pelopor kesatuan nasional, mitos 360 tahun penjajahan seluruh kepulauan Indonesia sebagai dasar bagi nasib dalam perlawanan bersama. menetapkan hari lahirnya gerakan Budi Utomo (BU) sebagai hari Kebangkitan Nasional Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 yang seharusnya pada tanggal 16 Oktober 1905, lahirnya Syarikat Dagang Islam yang menganut paham persamaan, persaudaraan, demokrasi, dan tidak menginginkan perpecahan karena perbedaan suku, agama dan ras. sangat jauh berbeda dengan organisasi BU, tercermin dalam anggaran dasarnya pasal 2 dan 3, bahwa selain suku Madura dan Jawa tidak boleh menjadi anggota, BU akan menempuh segala macam cara yang telah disetujui untuk mencapai tujuan. Bahkan gerakan itu anti agama sebagaimana diungkapkan Noto Suroto dalam salah seorang Tokoh BU bahwa agama adalah batu karang yang harus disingkirkan (Suroto dalam Firdaus, 1997:7).

Mitos-mitos ini diproduksi oleh kekuasaan untuk mengaburkan peran politik umat Islam masa lalu dan menonjolkan peran-peran *Indic* dalam pentas kesadaran kebangsaan, sebagaimana dikatakan oleh Rumulo (menteri luar negeri Philippina), penerapan demokrasi gaya Eropa Barat dan gaya Amerika yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tradisi dan latar belakang rakyat yang bersangkutan maka hal itu akan menimbulkan gesekan-gesekan antara rakyat dan pemerintahan (Mintaredja, 1976:42).

Penguasa pun seringkali memanfaatkan alam pikiran tradisional masyarakat Islam untuk memperkuat dasar legitimasinya. Misalnya, dalam konsep negara modern, ikatan dengan kebudayaan tradisional harus diputus. Akan tetapi di Indonesia yang terjadi sebaliknya, nasionalisme cenderung memperkuat dan membangkitkan unsur-unsur kebudayaan tradisional (Soedjatmoko, 1995:365).

Begitulah Negara Bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk, upaya untuk mewujudkan integrasi bangsa merupakan kerja politik yang fundamental, berat dan menantang, apalagi kemajemukan itu bersifat multidimensional, di mana keanekaragaman suku bangsa, sub kultur, bahasa dan agama terhimpun dalam suatu negara kebangsaan (Rasyid, 1998:213). Lalu bagaimanakah pendapat Mauker (1990:7) bahwa kekuatan Islam sebagian besar berada di tangan umat Islam Indonesia yang berpotensi dan mampu menjadi pemimpin dunia Islam karena melihat Indonesia negeri Muslim terbesar di dunia.

Kenyataannya, umat Islam Indonesia hanyalah sebuah kekuatan primitif ketika berhadapan dengan persenjataan modern negara, penggunaan cara kekerasan oleh aparat keamanan sangat sering terjadi. Dalam pengalaman umat Islam Indonesia sangat sedikit gerakan-gerakan Islam yang ditumpas bukan dengan jalan kekerasan (kekuatan senjata), mulai zaman penjajahan hingga masa kemerdekaan. Banyak kasus resistensi politik Islam Indonesia memperlihatkan itu, lihat saja apa yang terjadi pada kasus Tanjung Priok, Lampung Selatan, Kasus Peledakan Boom, kasus Jubah putih dengan perlengkapan senjata seadanya. Itulah sebabnya Kekuatan Islam selalu menghadang secara lantang setiap bentuk kekuasaan mapan yang sekuler.

Sebenarnya, penentangan umat Islam terhadap pemerintahan bangsa ini bukan pada dasar negaranya (Pancasila) tetapi haluan Negara Republik Indonesia yang berat sebelah kepada paham komunis pada awal kemerdekaan dan para pemimpin yang sekuler mengabaikan prinsip-prinsip politik Islam dalam struktur negara pasca kolonialisme (masa kemerdekaan) sehingga menimbulkan pertentangan abadi Islam dan ideologi sekuler di Indonesia.

Sikap Islam ini suatu hukum alam (sunnatullah) dalam ilmu sosial bahwa akan selalu menimbulkan friksi, gesekan atau malah benturan keras antara ideologi Islam dan ideologi non-Islam. Dalam

hal ini, banyak kalangan merasa pesimis bahwa Islam selamanya sulit untuk bisa duduk sejajar dengan nasionalisme sistem Barat di Indonesia, meskipun dikenal adanya istilah *peaceful co-existence* dalam Islam.

Begitu pula pada sistem sentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan Republik Indonesia menyebabkan perhatian Pemerintah banyak tersedot ke Pusat. Alasannya, daerah yang mayoritas muslim kurang diperhatikan dalam komunitas politik sehingga sering kali teralienasi dari kekuasaan politik, tanpa proses Parlementer. Mereka tidak pernah menjadi pembuat keputusan bahkan tidak mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Oleh karena itu, wajar jika umat Islam merupakan buih di tengah lautan, banyak jumlahnya tetapi dengan kekuasaan politik minus (Al Chaidar, 1999:113). Seandainya sistem kekuasaan di Indonesia tidak sentralisasi, gerakan Islam akan memiliki daya hidup yang panjang. Atmosfir demokrasi juga akan memberikan keleluasan umat Islam untuk mengartikulasikan idealismenya, hidup sesuai dengan ajaran Tuhan dalam semua bidang.

Begitulah situasi umat Islam Indonesia selalu didepolitisasi, khususnya di daerah. Misalnya, di Jawa Tengah, serangan retorik terhadap kaum santri merupakan ungkapan yang lumrah dalam setiap kegiatan politik. Begitu pula di Aceh, masyarakat menginginkan agar wewenang Pemerintah Pusat di limpahkan kepada pejabat-pejabat Aceh untuk memberlakukan hukum-hukum Islam bagi kaum muslimin dan menjadikan unsur-unsurnya dapat diterapkan dalam praktek bagi mereka (Boland, 1985:183). Tetapi pergulatan ideologis politik di Pusat mengenai dasar negara sangat sengit di konstituante sehingga sangat mempengaruhi penduduk lokal, merasa kecewa dengan negara yang mereka turut perjuangkan.

Pada era Reformasi ini, adanya pemilihan pemerintahan secara langsung (demokrasi) belum memberikan angin segar bagi umat Islam karena pihak lain merasa was-was Indonesia akan besar sehingga umat Islam Indonesia selalu dicurigai akan berpeluang menggalang keinginan bersama. Misalnya, Jamaah Islamiyah dicurigai berpeluang menjadi pan-Islamisme (Persatuan Islam Sedunia) yang dirintis oleh gerakan Wahabiyah dan Sunusiyah yang kemudian disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam, Jamaluddin al-Afghani yang dikenal sebagai bapak nasionalisme dalam Islam (Yatim, 2000:189)

Akibatnya, dituduhlah menjadi terorisme internasional (Suryanegara, 2003:41), padahal sejumlah pendeta Kristen Amerika menyesalkan kecenderungan media massa Amerika untuk menghubungkan terorisme dengan ajaran umat Islam khususnya tentang jihad sebab tidak ada ajaran Islam yang membenarkan teror, tetapi perlu diketahui bahwa semua itu merupakan perangkap politik tertentu (Rais, 1987: 131).

PENUTUP

Apabila dikenang secara sepintas kemajuan dan kejayaan politik Islam Indonesia dalam perkembangan sejarah masa lampau, terdapat suatu hal yang membanggakan, meskipun politik dalam Islam bukan berarti teknik dan taktik menggenggam dan menyalagunakan kekuasaan, menindas rakyat dan memperkaya golongannya sendiri melainkan, mempergunakan kekuasaan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia dari segala macam bentuk penjajahan.

Sudah menjadi kenyataan bahwa suatu cita-cita (ideologi) bagaimana pun murni dan tingginya, tidak dapat direalisasikan tanpa kekuatan politik. Begitu pula kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan rapi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa umat Islam cukup berperan di zaman Demokrasi Parlementer, kemudian terkesampingkan di zaman Demokrasi Terpimpin, masa Orde Baru dan Masa Reformasi umat Islam menjadi objek bukannya menjadi subjek dalam berbagai isu nasional. Dengan kata lain, umat Islam terlalu sering menjadi sasaran depolitisasi, isu asas tunggal, pendidikan moral pancasila (PMP), jilbab, ekstrim kanan, dan isu terorisme selalu dikaitkan dengan umat Islam sebagai sasaran garapan, padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan memeluk agama masing-masing.

Dalam suasana seperti ini umat Islam dituntut untuk mengambil peran sejarah yang lebih aktif. Alquran dan sunah memberikan pesan yang lugas di mana pun dan kapan pun, umat Islam harus melakukan kebajikan dan berhati-hati terhadap orang munafik sebab orang munafik mempunyai sifat mendasar yaitu sering menyebarkan isu-isu menyesatkan seperti mempertentangkan Agama dengan Negara, Islam dengan Kristen menyebabkan konflik sosial di kalangan rakyat Indonesia yang majemuk, padahal Tuhan menciptakan umat manusia

Indonesia dalam pluralitas agama, suku, dan bangsa dalam kerangka kesatuan agar saling mengenal dan saling menguatkan satu sama lain dalam keutuhan suatu Negara Bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, umat Islam Indonesia harus kembali melihat fenomena sejarah sebelum kemerdekaan sampai akhir tahun 1960-an, di mana umat Islam, kelompok Nasionalis, dan umat Kristen sangat rukun dalam perjuangan sehingga umat Islam tidak menjadi objek dalam pergolakan politik. Dalam hal ini, tidak ada maksud berapologi atau bernostalgia, tetapi umat Islam perlu menyadari kelemahan dan kelengahannya agar mampu menyongsong abad mendatang yang merupakan titik awal ditegakkannya tonggak sejarah baru ke arah tujuan bangsa Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Al Chaidar. 1999. *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*. Jakarta: Darul Falah.
- Effendi, Djohan (Ed.). 1984. *Agama dalam Pembanguna Nasional, Himpunan Sambutan Presiden Soeharto*. Jakarta: Kuning Mas.
- Firdaus, A.N. 1997. *Syarikat Islam Bukan Budi Utomo: Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa*. Jakarta: Datayasa.
- Imarah, Muhammad. 1997. *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kusnadingrat, E. 1996. *Gatra*. 6 April.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Munawwir, Imam. 1984. *Kebangkitan Islam dan Tantangan-Tantangan yang dihadapi dari Masa ke Masa*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Rais, M. Amien (Ed.). 1989. *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1987. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1998. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- _____. 2003. *Sabili* no. 9 Th. x.
- Soedjatmoko, et al., 1995. *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.